

PERAN MATA PELAJARAN PPKN DALAM MENGHADAPI FENOMENA REVOLUSI INFORMASI SEBAGAI SALAH SATU ANCAMAN TERHADAP KEDAULATAN DAN KEUTUHAN NKRI

Friskal Oktiansyah¹

Universitas Sebelas Maret, Surakarta

friskalokt@student.uns.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menelisik lebih dalam seberapa besar peran mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yang terdapat pada materi pembelajarannya dalam menghadapi revolusi informasi yang saat ini secara tidak langsung sedang menyerang kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya sebagai suatu ancaman terhadap kedaulatan dan keutuhan NKRI. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka atau studi literatur yang berkaitan dengan konten atau isi dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) itu sendiri dan mengenai revolusi informasi. Hasil yang dicapai setelah melakukan penelitian ini adalah: (1) Muatan materi pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yang terdapat dalam Permendikbud No. 21 Tahun 2016 menunjukkan adanya materi mengenai sikap – sikap tentang pentingnya integrasi nasional sebagai penggerak persatuan NKRI (2) Muatan materi pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) juga didalamnya terdapat materi bagaimana seorang warga negara memiliki strategi guna menghadapi dan menyelesaikan ancaman dalam Bhinneka Tunggal Ika salah satunya terhadap fenomena revolusi informasi sebagai salah satu ancaman terhadap kedaulatan dan keutuhan NKRI dengan berdasar pada Pancasila.

Kata kunci : PPKn, Revolusi, Informasi

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Setiap individu dibelahan dunia manapun membutuhkan informasi untuk mengetahui perkembangan apa yang sedang terjadi saat ini. Jika ada individu yang tidak mengikuti perkembangan informasi dapat dikatakan individu tersebut kurang *update* atau banyak masyarakat menyebutnya dengan sebutan *manusia kudet*. Penyebaran informasi yang cepat merupakan salah satu dampak dari revolusi informasi yang sebenarnya sudah terjadi sekitar satu dekade yang lalu. Informasi yang saat ini sangat mudah didapat dan diakses tidak lepas dari perkembangan dunia teknologi yang berkembang sangat pesat. Wiener (1948) mengatakan bahwa setelah perang dunia kedua, dampak dari perkembangan

¹ Mahasiswa program studi PPKn FKIP UNS tahun 2015

teknologi kedepan akan sangat mempengaruhi etika dan kehidupan social secara global. Teknologi, cara berpikir manusia, kebijakan yang terus berubah berdampak pada informasi yang juga terus berubah. Gabungan semua itulah yang disebut revolusi informasi.²

Secara jelas kita semua sudah merasakan dampak yang ditimbulkan akibat adanya revolusi informasi tersebut. Dampak tersebut membawa berbagai perubahan besar dalam tatanan hidup bermasyarakat saat ini. Mulai dari hubungan keluarga, hubungan dalam bermasyarakat, persoalan ekonomi, politik, social budaya hingga pada persoalan pertahanan dan keamanan nasional suatu negara. Transformasi informasi saat ini yang bagaikan dua mata pisau memiliki dua kemungkinan yang ditimbulkan, dan yang paling mengkhawatirkan adalah bergesernya pemahaman, sikap dan keterampilan berdasar moral yang dimiliki setiap individu. Peter F. Drucker dalam artikel berjudul "*Beyond the Information Revolution*" yang dimuat dalam *website* The Atlantic menulis bahwa di tahun ketika artikel tersebut dimuat dampak revolusi informasi yang sebenarnya baru mulai dirasakan. Namun bukan informasi yang menjadi isi dari dampak tersebut, bukan juga kemampuan buatan, bukan akibat dari computer dan pengolahan data dalam pembuatan kebijakan, pengambilan keputusan, dampak tersebut merupakan sesuatu yang praktis yang tak seorang pun dapat memprediksinya. Drucker juga menulis :³

"But the impact may be even greater on societies and politics and above all, on the way we see the world and ourselves in it. At the same time, new and unexpected industries will no doubt emerge and fast.... Just a similar innovation some 10.000 years ago changed our ancestor from hunters and gatherers on the land into agriculturists and pastoralists."

Intinya Drucker menulis bahwa revolusi informasi akan muncul secara seketika, memipin atau yang menjadi arah perindustrian baru dan juga memiliki dampak yang tidak dapat diprediksi. Seperti yang telah ditulis diatas bahwa informasi yang saat ini sangat mudah didapat dan diakses berkat perkembangan teknologi yang sangat pesat, dengan

² Wiener, N. 1948. *Cybernetics: or Control and Communication in the Animal and the Machine*. Boston, MA: Technology Press dalam Suoth, Gerald Kevin. 2011. *Revolusi Informasi: Studi Pengaruh Dimensi Budaya Dan Model Evolusi Informasi*. Seminar Nasional Aplikasi Teknologi informasi 2011: Yogyakarta, 27-18 Juni 2011, G-30

³ Drucker, Peter F. 1999. *Beyond the Information Revolution*.
<https://theatlantic.com/magazine/archive/1999/10/beyond-the-information-revolution/304658/> diakses pada 16 April 2018

teknologi tersebut sangat mungkin informasi dari dalam negeri dapat dengan mudah diakses di negara lain yang memunculkan istilah dunia tanpa batas.

Informasi yang dibagikan dari belahan dunia manapun dapat kita akses secara mudah, mulai dari peristiwa politik, ekonomi dan mungkin isu pertahanan keamanan suatu negara dapat dengan mudah di akses setiap individu di seluruh dunia. Informasi yang berkaitan dengan masalah kenegaraan yang mungkin hal kecil dapat menjadi *boomerang* bagi negara yang dengan atau tidak sengaja membagikan informasi tersebut. Misalnya saja saat ini negara Indonesia sedang mengalami krisis moral, banyak media yang membagikan berita tentang hal tersebut. Maka informasi tersebut dapat diakses oleh setiap orang di seluruh dunia, dan karenanya mungkin warga Indonesia dapat disusupi oleh ideology – ideology yang bertentangan dengan ideology Indonesia saat ini. Jika hal tersebut terus menerus terjadi tentu akan berakibat bagi kedaulatan negara kita dalam hal ideology utamanya. Kedaulatan dan keutuhan negara secara perlahan tergerus yang diakibatkan oleh mudahnya orang di setiap dunia mengakses informasi.

Maraknya persoalan bangsa Indonesia dapat muncul dari dalam maupun luar negeri, dan yang menjadi salah satu penyebabnya adalah pesatnya perkembangan teknologi dan informasi. Seperti artikel yang ditulis oleh Kapten Inf Dony Rahmad Putra (2017) : ⁴

“Pemanfaatan teknologi informasi sangat berguna bagi hal-hal yang konstruktif, untuk menjalin hubungan sosial antar negara maupun mendistribusikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat luas. Disisi lain tidak dapat dihindari bahwa penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi juga ditujukan untuk hal-hal yang destruktif, guna memuluskan kepentingan perorangan, kelompok dan bahkan oleh negara asing dalam rangka menyebarluaskan pengaruh atau dalam rangka perang informasi.”

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pasal 31 ayat 5 menyatakan bahwa Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai – nilai agama dan persatuan bangsa untuk memajukan peradaban kesejahteraan umat manusia.⁵ Namun, saat ini terjadi penyimpangan pada pasal tersebut,

⁴ Putra, Dony Rahmad. 2017. *Ketahanan Informasi Menjadi Bagian Ketahanan Nasional*. https://kostrad.mil.id/post_artikel/458/ diakses pada 16 April 2018

⁵ Republik Indonesia. 2002. *Undang – Undang Dasar 1945 setelah Amandemen Keempat*. Jakarta: Majelis Permusyawaratan Rakyat

banyak informasi – informasi yang berbau SARA yang menyebabkan retaknya persatuan dan kesatuan bangsa dan menjadi ancaman nyata dalam bidang ketahanan dan pertahanan bagi bangsa Indonesia yang dapat menggerus kedaulatan dan keutuhan NKRI.

Oleh sebab itu, mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai salah satu bentuk pendidikan moral, pendidikan bela negara, dan pendidikan yang mendidik bagaimana menjadi seorang pribadi cerdas atau *smart and good citizen* bertugas menghadapi fenomena revolusi informasi yang merebak sangat cepat yang menjadi salah satu ancaman terhadap pertahanan dan keamanan nasional.

2. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana isi mata pelajaran PPKn terkait integrasi nasional sebagai motor penggerak persatuan NKRI guna menghadapi ancaman terhadap negara ?
- b. Bagaimana muatan materi pembelajaran mata pelajaran PPKn dalam menghadapi fenomena revolusi informasi sebagai salah satu ancaman terhadap kedaulatan dan keutuhan NKRI dengan berdasar Pancasila ?

3. Tujuan

- a. Mengetahui isi mata pelajaran PPKn terkait integrasi nasional sebagai motor penggerak persatuan NKRI guna menghadapi ancaman terhadap negara
- b. Mengetahui muatan materi pembelajaran mata pelajaran PPKn dalam menghadapi fenomena revolusi informasi sebagai salah satu ancaman terhadap kedaulatan dan keutuhan NKRI dengan berdasar Pancasila

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka, dimana peneliti mengambil referensi dari berbagai sumber buku, artikel daring, maupun jurnal yang relevan. Sugiyono (2012) menjelaskan bahwa studi kepustakaan berkaitan dengan nilai, budaya, dan norma yang berkembang pada situasi social yang diteliti, selain itu studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literatur – literatur ilmiah.⁶ Subjek dalam penelitian ini adalah mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan serta objek penelitian ini adalah fenomena revolusi informasi sebagai suatu ancaman terhadap kedaulatan dan keutuhan NKRI. Studi kepustakaan menjadi teknik analisis

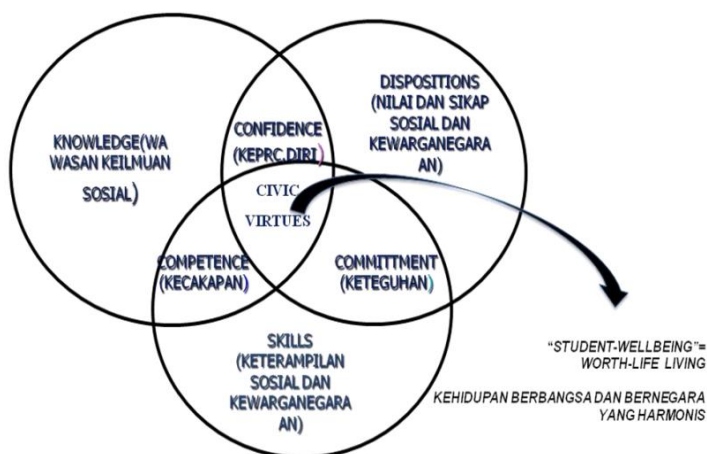
⁶ Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta : Bandung

data dalam penelitian ini karena peneliti mengkaji teori – teori dan permasalahan dalam buku, artikel maupun jurnal penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKn merupakan salah satu mata pelajaran yang mengajarkan mengenai pendidikan moral, pendidikan bela negara dan bagaimana seseorang dapat menjadi warga negara yang baik atau *smart and good citizen*. Pandangan Tilaar (2005) bahwa semakin banyak pihak yang peduli dan mengupayakan pembentukan manusia Indonesia menjadi religious, beriman, bertaqwa, dan berbudi pekerti luhur semakin baiklah adanya.⁷

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan memiliki peran yang sangat vital dan strategis dalam membentuk karakter bangsa, mulai dari nilai, moral, pengetahuan dan lain sebagainya. Undang – Undang Negara Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa salah satu mata pelajaran wajib yang dimuat dalam kurikulum pendidikan menengah dan tinggi adalah Pendidikan Kewarganegaraan. Penjelasan pasal tersebut mengenai Pendidikan Kewarganegaraan yaitu Pendidikan Kewarganegaraan yang dimaksud adalah untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.⁸



Gambar 1. Ilustrasi Konsepsi holistic-integratif Capaian Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan olahan Winataputra (2001, 2006, 2015) dari konsepsi CCE (1986) dalam Winataputra dan Riza Alrakhman (2015)

⁷ Tilaar, H.A.R. 2007. Mengindonesiakan Etnisitas dan Identitas Bangsa Indonesia. Jakarta : Rineka Cipta.

⁸ Republik Indonesia. 2003. Undang – Undang Negara Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Sekretaris Negara

Udin S. Winataputra dan Riza Alrahman (2015) mengatakan bahwa inti dari hasil belajar atau capaian pembelajaran pendidikan kewarganegaraan adalah terbentuknya / berkembangnya keadaban kewarganegaraan atau *civic virtues* yang merupakan puncaknya dari proses sinergis-psikologis dari proses kognitif, afektif, dan keterampilan dalam konteks social-kultural *civic culture* atau budaya kewarganegaraan, yakni kehidupan berbangsa dan bernegara yang harmonis atau *student-wellbeing and worth-life living*.⁹

Jika dilihat dari gambar 1 yang diilustrasikan Udin. S Winataputra, Pendidikan Kewarganegaraan memiliki tiga kompetensi utama yaitu *knowledge* (wawasan keilmuan social), *skills* (keterampilan social dan kewarganegaraan), dan *dispositions* (nilai dan sikap social dan kewarganegaraan). Wawasan keilmuan social jika beririsan dengan nilai dan sikap social dan kewarganegaraan akan menghasilkan *civic confidence* atau kepercayaan diri kewarganegaraan, selanjutnya jika wawasan keilmuan social beririsan dengan keterampilan social dan kewarganegaraan akan menghasilkan *civic competence* atau kecakapan kewarganegaraan, dan jika nilai dan sikap social dan kewarganegaraan beririsan dengan keterampilan social dan kewarganegaraan akan menghasilkan *civic commitment* atau keteguhan kewarganegaraan. Terakhir, jika ketiga komponen kompetensi utama itu saling beririsan akan menghasilkan *civic virtues* atau keadaban kewarganegaraan yang akan menjadikan kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi harmonis.

Muatan materi sesuai pada Permendikbud No. 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah dan kompetensi mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada Permendikbud No. 24 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Pada Kurikulum 2013 Pada Pendidikan Dasar dan Menengah menunjukkan beberapa didalamnya terdapat materi mengenai integrasi nasional untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI misalnya pada standar isi pada tingkat kompetensi pendidikan dasar yang berisi siswa diharapkan memiliki sikap menghargai dan menghayati dengan dasar dan kesadaran nilai, moral, norma, prinsip dan spirit keseluruhan entitas kehidupan kebangsaan. Hal tersebut menandakan bahwa mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan didalamnya telah disisipkan kompetensi tentang keutuhan dan

⁹ Winataputra, Udin S dan Riza Alrahman. 2015. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PKN) Untuk Generasi Emas Indonesia: Rekonstruksi Capaian Pembelajaran*. Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan Departemen Pendidikan Kewarganegaraan Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia. Prosiding Seminar Nasional Penguatan Komitmen Akademik Dalam Memperkokoh Jatidiri PKn

kedaulatan NKRI. Selain itu masih dalam Permendikbud No. 21 tahun 2016 terdapat juga kompetensi berkaitan dengan bagaimana seorang siswa yang merupakan seorang warga negara juga memiliki sikap mampu menghadapi ancaman untuk membangun integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.

Selain itu kompetensi dasar yang menjadi dasar guru dalam memberi pembelajaran di kelas yang ada dalam Permendikbud No. 24 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Pada Kurikulum 2013 Pada Pendidikan Dasar dan Menengah terdapat kompetensi dasar mengenai ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dimana siswa diharapkan memiliki rasa syukur atas nilai yang membentuk kesadaran atas ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dan siswa juga dituntut memiliki sikap responsif dan proaktif atas ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang ipoleksosbudhankam dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.

Hal – hal diatas menunjukkan bahwa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan selain sebagai pendidikan moral namun juga dapat sebagai pendidikan bela negara di tingkat pendidikan formal. Sejalan dengan hal tersebut, Winarno (2012) mengatakan bahwa politik pendidikan di Indonesia berupaya menjadikan PKN tidak hanya sebagai pendidikan kebangsaan, namun juga pendidikan demokrasi, pendidikan kesadaran berkonstitusi, pendidikan bela negara, pendidikan HAM, pendidikan lingkungan hidup, pendidikan multicultural, pendidikan hukum, dan pendidikan antikorupsi.¹⁰ Beberapa penjelasan terkait PPKn tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sebenarnya PPKn memiliki peran yang penting dalam membentuk karakter warga negara yang baik, didalamnya tereintegrasi semua materi pendidikan yang bertujuan untuk menjadikan warga negara yang baik dan cerdas. Lalu bagaimana perananan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sendiri dalam menghadapi gencarnya fenomena revolusi informasi yang saat ini sedang dihadapi bahkan saat ini sudah banyak penyimpangan dalam konteks fenomena revolusi informasi

Fenomena revolusi informasi tidak dapat dilepaskan dengan adanya teori media baru atau *new media theory*. Sadiman (2005) mengatakan media merupakan segala bentuk dan

¹⁰ Winarno. 2012. *Perubahan Global & Penguatan Pilar Kebangsaan Melalui PKN*. Makalah disajikan dalam Seminar Nasional di IKIP PGRI Madiun, tanggal 7 Januari 2012

saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi.¹¹ Lister (2009) memecah pengertian umum dari media baru menjadi beberapa bagian yang mudah dikelola, media baru mengacu pada beberapa hal berikut (1) Pengalaman tekstual baru, (2) Cara baru dalam menggambarkan dunia, (3) Hubungan baru antara subjek (pengguna dan konsumen) dan media teknologi, (4) Pengalaman baru tentang hubungan antara perwujudan, identitas, dan komunitas, (5) Konsepsi baru mengenai hubungan biologi tubuh dan media teknologi dan, (6) Pola baru organisasi dan produksi.¹²

Lister (2009) juga mengatakan “...these here as some of main terms in discourses about new media. These are **digital, interactive, hypertextual, virtual, networked, and simulated.**”¹³ Perkembangan dari teori media baru tersebut memunculkan banyak inovasi dalam menyampaikan sebuah informasi. Namun terkadang penyampaian informasi sering disalahgunakan oleh oknum – oknum tertentu, apalagi dengan mudahnya orang membuat sebuah informasi dan dapat seketika dibagikan disaat yang sama berkat dukungan teknologi yang canggih saat ini. Pada dasarnya sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat 5 yang mengamatkan bahwa Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai – nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban kesejahteraan umat manusia.

Informasi – informasi menyimpang yang dapat menjadi ancaman nyata bagi pertahanan dan keamanan nasional yang dibagikan oleh oknum tidak bertanggung jawab didukung mudahnya akses penyebaran informasi secara daring, melalui social media misalnya dapat menggerus kedaulatan dan keutuhan NKRI. Seperti data statistic dibawah ini:

Jumlah Pelanggan Telepon Indonesia menurut Jenis Penyelenggaraan Jaringan, 2010-2015

Jenis Penyelenggaraan Jaringan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Telekomunikasi dengan Kabel	9,349,998	8,650,716	7,667,184	4	9,885,971	7
Telekomunikasi	243,779,4	279,772,3	312,279,3	331,709,0	341,921,8	341,482,7

¹¹ Sadiman, A. 2005. *Media Pendidikan Pengertian, Pengembangan, dan Pemanfaatannya*. Jakarta: Pustekkom Dikbud dan PT. Raja Grafindo Persada

¹² Lister. M. et al. 2009. *New Media: a Critical Introduction Second Edition*. New York: Taylor & Francis Routledge’s, published in the Taylor & Francis e-Library, 2008

¹³ Lister. M. et al. 2009. *New Media: a Critical Introduction Second Edition*. New York: Taylor & Francis Routledge’s, published in the Taylor & Francis e-Library, 2008

tanpa Kabel	22	83	36	63	94	47
Telepon Tetap	32,579,12	29,966,76	30,315,67	18,482,14	16,339,00	
Nirkabel	5	4	1	9	3	2,534,407
Telepon Selular	211,200,2	249,805,6	281,963,6	313,226,9	325,582,8	338,948,3
	97	19	65	14	91	40
Jumlah Pelanggan	253,129,4	288,423,0	319,946,5	341,794,6	351,807,8	351,860,7
	20	99	20	87	65	84

Sumber: Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Perusahaan Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi

Data dikutip dari Publikasi Statistik Indonesia

Tabel 1. Tabel Jumlah Pelanggan Telepon Indonesia menurut Jenis Penyelenggaraan Jaringan, 2010-2015

Data yang dapat diambil dari tabel statistic tersebut yaitu, pengguna telepon di Indonesia setiap tahunnya selalu meningkat, terlebih pelanggan telepon seluler yang setiap tahun meningkat secara signifikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia berpandangan bahwa penggunaan telepon terlebih telepon seluler mempermudah segala proses salah satunya penerimaan dan penyebaran informasi secara cepat.

Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas yang Pernah Mengakses Internet dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Jenis Kegiatan Utama, 2012–2015

Tahun	Jenis Kegiatan Utama			
	Bekerja	Sekolah	Mengurus Rumah Tangga	Lainnya
2012	47,8	46,3	37,55	4
	4	6		1,34
2013	49,7	43,1	41,48	4
	3	1		4,45
2014	50,6	41,5	43,27	4
	7	8		5,98
2015	52,0	36,5	41,46	4
	7	0		1,42

Sumber: Diolah dari Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Tabel 2. Tabel Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas yang Pernah Mengakses Internet dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Jenis Kegiatan Utama, 2012–2015

Tabel tersebut menggambarkan dengan jelas bahwa segala jenis kegiatan yang dilakukan individu pasti akan membutuhkan akses internet. Saat ini di zaman millennium , internet merupakan pintu utama masuk dan keluarnya berbagai macam informasi, mulai dari informasi yang bermanfaat hingga informasi provokator yang dapat mengancam keamanan dan pertahanan nasional. Akses internet dilakukan mulai dari kegiatan bekerja hingga

mengurus rumah tangga sekalipun membutuhkan akses internet, oleh sebab itu mudah sekali informasi tersebar secara merata ke seluruh pelosok penjuru negeri.

Kapten Inf Dony Rahmad Putra (2017) menyampaikan bahwa keadaan yang terjadi saat ini adalah massifnya penyebaran fitnah, hinaan dan pengiriman berita bohong/hoax yang dapat menyebabkan perpecahan, membahayakan persatuan dan kesatuan, kebhinekaan dan munculnya radikalisme. Oleh karena itu untuk menghadapi persoalan ini maka diperlukan ketahanan informasi. Ketahanan informasi merupakan suatu kebijakan menyaring dan mencegah berbagai informasi tidak benar dan tanpa data, termasuk penyebaran berita bohong/hoax.¹⁴

Winataputra (2016) secara konseptual dan holistic mengatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan bertujuan agar setiap warganegara muda (*young citizens*) memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam konteks nilai dan moral Pancasila, nilai dan norma Undang – Undang Dasar Tahun 1945, nilai dan komitmen Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen bernegarakesatuan Republik Indonesia.¹⁵ Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan disini menjadi salah satu kunci dalam menghadapi fenomena revolusi informasi yang saat ini banyak sekali terjadi penyimpangannya. Sebagai salah satu pendidikan moral, PPKn bertugas menjadikan individu memiliki moral yang baik yang dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, sebagai pendidikan bela negara, PPKn juga berfungsi menanamkan rasa cinta tanah air kepada setiap individu di Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

- a. Mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai salah satu mata pelajaran yang didalamnya terdapat penanaman nilai – nilai Pancasila dapat menjadi pioneer utama dalam membentuk karakter kewarganegaraan yang bertugas menjadikan warga negara *smart and good* yang tentu mampu menghadapi fenomena revolusi informasi.

¹⁴ Putra, Dony Rahmad. 2017. *Ketahanan Informasi Menjadi Bagian Ketahanan Nasional*. https://kostrad.mil.id/post_artikel/458/ diakses pada 16 April 2018

¹⁵ Winataputra.S. Udin. 2016. *Posisi Akademik Pendidikan Kewarganegaraan (Pkn) dan Muatan/Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dalam Konteks Sistem Pendidikan Nasional*. Jurnal Moral Kemasyarakatan Vol. 1, No.1

- b. Mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai salah satu bentuk pendidikan bela negara mampu menanamkan nilai – nilai semangat kebangsaan dan cinta tanah air bagi setiap warga negara demi menjadi penyaring informasi atau apapun yang masuk ke ataupun terdapat dalam wilayah Indonesia yang sekiranya menjadi ancaman terhadap kedaulatan dan keutuhan NKRI.

2. Saran

Penyampaian materi pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tidak hanya di fokuskan di lingkup formal saja, namun dapat diperluas ke segala lingkup, agar semua warga negara dapat merasakan manfaatnya terlebih saat ini Indonesia dapat dikatakan krisis kepercayaan karena maraknya informasi bohong/ hoax yang menyebar di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. <https://bps.go.id> diakses pada 16 April 2018

Drucker, Peter F. 1999. *Beyond the Information Revolution*. <https://theatlantic.com/magazine/archive/1999/10/beyond-the-information-revolution/304658/> diakses pada 16 April 2018

Lister. M. et al. 2009. *New Media: a Critical Introduction Second Edition*. New York: Taylor & Francis Routledge's, published in the Taylor & Francis e-Library, 2008.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 21 Tahun 2016 Tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah. Jakarta: Depdikbud.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 24 Tahun 2016 Tentang Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Pada Kurikulum 2013 Pada Pendidikan Dasar dan Menengah. Jakarta: Depdikbud.

Putra, Dony Rahmad. 2017. *Ketahanan Informasi Menjadi Bagian Ketahanan Nasional*. https://kostrad.mil.id/post_artikel/458/ diakses pada 16 April 2018

Republik Indonesia. 2002. *Undang – Undang Dasar 1945 setelah Amandemen Keempat*. Jakarta: Majelis Permusyawaratan Rakyat

Republik Indonesia. 2003. *Undang – Undang Negara Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Sekretaris Negara

Sadiman, A. 2005. *Media Pendidikan Pengertian, Pengembangan, dan Pemanfaatannya*. Jakarta: Pustekkom Dikbud dan PT. Raja Grafindo Persada

- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta : Bandung
- Tilaar, H.A.R. 2007. *Mengindonesia Etnisitas dan Identitas Bangsa Indonesia*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Wiener, N. 1948. *Cybernetics: or Control and Communication in the Animal and the Machine*. Boston, MA: Technology Press dalam Suoth, Gerald Kevin. 2011. *Revolusi Informasi: Studi Pengaruh Dimensi Budaya Dan Model Evolusi Informasi*. Seminar Nasional Aplikasi Teknologi informasi 2011: Yogyakarta, 27-18 Juni 2011, G-30
- Winarno. 2012. *Perubahan Global & Penguatan Pilar Kebangsaan Melalui PKN*. Makalah disajikan dalam Seminar Nasional di IKIP PGRI Madiun, tanggal 7 Januari 2012
- Winataputra, Udin S dan Riza Alrahman. 2015. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PKN) Untuk Generasi Emas Indonesia: Rekonstruksi Capaian Pembelajaran*. Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan Departemen Pendidikan Kewarganegaraan Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia. Prosiding Seminar Nasional Penguatan Komitmen Akademik Dalam Memperkokoh Jatidiri PKN.
- Winataputra.S. Udin. 2016. *Posisi Akademik Pendidikan Kewarganegaraan (Pkn) dan Muatan/Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dalam Konteks Sistem Pendidikan Nasional*. Jurnal Moral Kemasyarakatan Vol. 1, No.1.